

TEORI-TEORI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DALAM PERBINCANGAN: ALIRAN DAN PANDANGAN

Oleh: Mohammad Maiwan*

ABSTRACT

This article briefly describes some of the major theories of international political economy, namely: Liberal Trade Theory; Nationalist trade theory; The theory of "Dual Economy"; Theory of the Modern World System (MWS); Hegemonic stability theory. Each of these theories has shown an important aspect of economic and political relations. In addition to having the advantages of each, above theories also opened the weaknesses of another theory, allowing us to see the extent of his power in explaining trends in today's global economy. Each theory has its contextual truth respectively. In addition, any such theory can not stand alone. We need elements of each other's views to be aware of the complex relationship between economics and politics. In international relations the interrelationship or interplay between economic factors with the political factor is absolute.

Key Words: Political economy, international relations, theory.

Pendahuluan

Sebagai suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang aspek-aspek hubungan antarbangsa dalam berbagai segi, ilmu Hubungan Internasional memiliki beberapa sub disiplin yang secara khusus menguraikan tentang masalah-masalah ekonomi pada tataran internasional. Sub disiplin ini dikenali sebagai Ekonomi Politik Internasional (*International Political Economy*). Bidang ini membicarakan interaksi, *interplay*, *interrelated*, kait mengait, saling mempengaruhi antara faktor-faktor politik dan ekonomi dalam lingkup hubungan internasional. Fokus analisis Ekonomi Politik Internasional ditumpukan pada adanya interaksi antara faktor-faktor “pasar” dan “negara”, antara *exchange* dan *authority*, antara *wealth* dan *power* dalam suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Dalam lanskap politik internasional aspek-aspek tersebut mengemuka secara kentara, sehingga mencetuskan banyak perhatian.

Secara sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh Walter S. Jones (1993: 223) konsep itu diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Beliau selanjutnya mengutip

*Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

pandangan Robert Gilpin yang menyatakan eratnya kaitan antara politik dan ekonomi itu sebagai berikut (Jones 1993: 223-224):

Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak hubungan kekuasaan antarkelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik.

Dengan demikian, ekonomi politik internasional merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Pandangan ini membawa implikasi bahwa teori ekonomi politik internasional bukanlah teori ekonomi murni, dalam artian membahas isu-isu ekonomi melalui secara teknis dan juga bukan teori politik murni, yang melihat dimensi ekonomi melalui bersifat politis. Namun lebih dari itu, teori ekonomi politik internasional berfungsi untuk menjelaskan berbagai kait mengait antara faktor-faktor ekonomi dan politik, pasar dan negara, dalam *setting* internasional. Sebagaimana diketahui, semenjak Revolusi Industri abad 16 aspek ekonomi dari sistem internasional memiliki kekuatan dominan. Kebutuhan akan adanya bahan mentah, pasar, tenaga kerja, sumber energi, serta teknologi, menjadikan penerapannya dalam politik internasional menjadi semakin besar (Frieden & Lake 1991: 4).

Apalagi setelah Perang Dunia II di mana muncul persaingan antara blok Barat yang liberalis-kapitalis dan Timur yang sosialis-komunis, yang bukan hanya berbentuk persaingan ideologi politik secara tajam, tetapi juga haluan ekonomi. Kendati masalah-masalah yang muncul untuk sebagian adalah masalah ekonomi, namun hakikatnya mempengaruhi sistem politik internasional. Karena itu, kemudian muncul pelembagaan sistem ekonomi internasional penunjang untuk mengatur tatanan ekonomi internasional dalam bentuk munculnya organisasi-organisasi kerjasama internasional seperti: PBB, ASEAN, APEC, IMF, Bank Dunia, OPEC, GATT, IBRD, ADB dan lain-lain.

Sejauh ini, di kalangan penstudi hubungan internasional ada beberapa teori yang berkembang dalam sub disiplin ekonomi politik internasional. Akan tetapi karena keterbatasan

tempat dan waktu, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penting-penting saja, yang menjadi arus utama dalam perbincangan beberapa dekade belakangan ini.

.Teori Perdagangan Liberal

Pada prinsipnya, teori perdagangan liberal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, aliran klasik yang dimotori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Kedua, adalah aliran neo-klasik yang merupakan pembaruan daripada aliran yang pertama di atas. Tokoh-tokoh neo-klasik misalnya, adalah, Samuelson dan Paul Krugman. Tokoh aliran liberal, Adam Smith menyatakan gagasannya tentang keunggulan absolut (*absolute advantage*), di mana kunci dari kekuatan dan kekayaan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dan sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi itu adalah perdagangan internasional. Menurut pandangan beliau, dalam perdagangan internasional harus diciptakan pembagian kerja (*division of labour*) atau spesialisasi, yang mana setiap negara menciptakan produksinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Gilpin 1987: 41-42).

Dengan Pembagian kerja atau spesialisasi ini dimaksudkan agar negara-negara yang menghasilkan sejumlah produk berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada negara-negara lain yang hanya memiliki sedikit produk. Inilah yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut. Doktrin lain dari teori ini juga menyatakan bahwa perdagangan internasional harus berdasarkan prinsip persaingan bebas (*fair competition*) atau pasar bebas (*free market*). Dalam pengertian ini, arus barang dari satu negara ke negara lain harus bebas dari hambatan-hambatan politik (*political barriers*), sehingga pergerakan barang lintas negara berlangsung bebas dan alamiah berdasarkan hukum pasar. Teori ini menegaskan bahwa pembatasan arus barang dari suatu negara ke negara lain akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang menggerogoti seluruh kekuatan negara. Langkah-langkah seperti: Proteksi, dumping, dan lain-lain dianggap sebagai hal buruk yang harus dihindari. Interaksi dan campur tangan negara yang terlalu besar terhadap bidang perdagangan internasional akan mendistorsi pasar dan bisa jadi menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi.

Tokoh lain yang mengemukakan aspek keunggulan komparatif adalah David Ricardo. Dalam pandangan beliau, perdagangan internasional yang seimbang dan berkeadilan akan terwujud jika masing-masing negara menekankan pada dimensi keunggulan komparatif. Hal ini bermakna bahwa negara-negara yang menghasilkan produk tertentu dengan biaya relatif rendah

akan memiliki keunggulan atas produk tersebut dalam perdagangan internasional. Melalui cara ini akan terjadi efisiensi di mana setiap negara akan berpartisipasi dalam aktifitas perdagangan internasional sesuai dengan kemampuan terbaiknya dalam produk-produk tertentu. Selanjutnya, Ricardo menyatakan bahwa, negara-negara menspesialisasikan terhadap produk tertentu terutama karena pertimbangan biaya komparatifnya paling rendah, bukan karena keunggulan absolut atas negara lain (Brown 2001: 154-156).

Oleh karena itu, suatu negara meskipun memiliki keunggulan absolut atas suatu produk, bisa saja tidak menjadi eksportir produk tersebut, sejauh biaya komparatifnya lebih mahal daripada bila diproduksi negara lain. Hal ini bisa berasal dari faktor produksi tertentu misalnya; tenaga kerjanya yang murah, ketersediaan bahan mentah, ataupun teknologinya, sehingga suatu negara mencapai tahap efisiensi yang lebih, ketimbang yang lain. Secara ringkas Ricardo menyatakan bahwa aktifitas perdagangan bebas akan membawa keuntungan bagi semua partisipan, sebab perdagangan ini akan menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi akan meningkatkan efisiensi, dan secara otomatis juga meningkatkan produktifitas (Jackson & Sorensen 2005: 235).

Pandangan yang dikemukakan Ricardo ini belakangan direvisi oleh Eli F. Heckscher dan Bertil Ohlin. Melalui teori-teorinya, Heckscher berpendapat bahwa, perdagangan internasional telah mengubah faktor harga (tanah, tenaga kerja, dan modal) dan karenanya mendistribusikan pendapatan dalam suatu negara. Faktor harga ini menyebabkan perubahan-perubahan fundamental yang memunculkan pergeseran-pergeseran yang berpengaruh pada produksi suatu negara (Frieden & Lake 1991: 73). Hal tersebut pada gilirannya akan mencetuskan terjadinya ketimpangan kekayaan di antara negara-negara. Sementara itu menurut Ohlin, negara-negara tertentu didukung secara tidak sebanding oleh faktor-faktor tertentu sehingga memungkinkan mereka dapat memproduksi komoditas yang paling menguntungkan. Karena itu, tidak mungkin setiap negara bisa memproduksi suatu barang yang sama, karena nilai efisiensi yang akan didapatkan berbeda. Dalam hal ini Ohlin menyatakan bahwa, spesialisasi produksi yang dilakukan suatu negara pada tingkatan tertentu akan memberikan nilai maksimum sesuai dengan kemampuannya dibandingkan dengan negara lain.

Pada prinsipnya, Heckscher dan Ohlin (H-O) menyatakan bahwa perbedaan relatif faktor pemberian alam (*endowments factor*) dan harga faktor produksi antarnegara sebagai determinan perdagangan yang paling penting (dengan asumsi bahwa teknologi dan citarasa negara sama).

Teori H-O berpendapat bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah serta mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka dan mahal. Teori H-O menganggap bahwa perdagangan akan menghapuskan atau mengurangi perbedaan harga absolut dan harga relatif faktor produksi sebelum perdagangan antar negara.

Teori Perdagangan Nasionalis

Selanjutnya teori yang kedua adalah, teori perdagangan nasionalis atau seringkali disebut sebagai teori merkantilis. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki peran utama dalam perdagangan internasional. Dalam pandangan teoritis perdagangan nasionalis, aktifitas ekonomi adalah dan seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasaan politik. Kepentingan nasional adalah tujuan akhir dari kegiatan perdagangan. Teori ini melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Dikemukakan bahwa, persaingan ekonomi antarnegara adalah permainan *zero-sum*, di mana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain (Jackson & Sorensen 2005: 231)..

Salah satu tokoh utama teori ini adalah Alexander Hamilton yang merupakan salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat. Menurut Hamilton suatu negara dalam kebijakan perdagangan internasionalnya harus lebih mengutamakan barang-barang manufaktur daripada komoditi pertanian. Dalam pandangan beliau, hanya dengan memproduksi barang-barang manufaktur suatu negara akan memperoleh keuntungan yang besar dalam perdagangan internasional. Keuntungan itu selanjutnya akan bermuara pada kekuatan nasional negara tersebut. Sebab itu, negara-negara yang sebelumnya masih mengimpor barang-barang manufaktur dari negara lain harus menempuh kebijakan atau strategi “substitusi impor”. Negara itu harus memproses sendiri barang-barang yang dibutuhkan rakyatnya, kendati dilihat dari prinsip efisiensi (keunggulan komparatif) lebih menguntungkan bila mengimpor dari negara lain (Brown 2001: 156).

Karena itu, bagi Hamilton, lokasi di mana sebuah produk diproses tidak semata-mata ditentukan oleh prinsip efisiensi dan spesialisasi yang didasarkan atas prinsip keunggulan absolut dan relatif saja. Pilihan terhadap lokasi di mana sebuah barang dibuat harus ditentukan berdasarkan keputusan politik dari sebuah negara. Dengan kata lain, negara harus memutuskan

untuk mengubah haluan ekonominya. Karenanya teori substitusi impor dari Hamilton tersebut bertentangan dengan prinsip *division of labour* sebagaimana dikemukakan teori perdagangan liberal. Menurut Hamilton, prinsip pembagian kerja dan spesialisasi dalam perdagangan internasional hanya menguntungkan negara-negara tertentu. Karena itu, negara-negara yang tidak bisa memproduksi barang-barang manufakturnya sendiri harus sekuat tenaga untuk dapat memproduksinya sehingga bisa menutup jurang perbedaan itu.

Teoritisi perdagangan nasionalis lain adalah Friedrich List. List mengemukakan tentang pentingnya campur tangan negara dalam aspek ekonomi. Keberhasilan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa adanya campur tangan secara politik (Brown 2001: 156-157). Dalam konteks hubungan antar bangsa, List mencontohkan bagaimana keberhasilan Inggris sebagai negara imperium dunia di masa lalu, dengan pengaruh luas di seberang lautan, karena didukung oleh kekuatan industrialisasi yang digerakkan negara. Dia tidak setuju kalau pembangunan ekonomi semata-mata didasarkan pada aspek-aspek efisiensi, keunggulan komparatif, serta pilihan-pilihan produksi tertentu saja tanpa melibatkan faktor politik.

Dalam pandangan List, Inggris justru berjaya karena menggunakan kekuatan politik untuk memajukan industri dan perdagangan mereka. Pada masa-masa awal industrialisasi dan perdagangan internasional di masa lalu, negara tersebut tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Tahap kemampuan perdagangan internasional Inggris mencapai tahap kejayaan yang ditopang oleh supremasi teknologi dan industri yang disokong kuat oleh bidang militer. Adalah mustahil untuk melindungi kepentingan industri yang baru tumbuh dan sengitnya persaingan perdagangan internasional kalau semata-mata hanya mengandalkan faktor ekonomi.

Jadi, dalam perspektif beliau, sebuah negara yang kuat hanya bisa dicapai melalui nasionalisme ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut bisa ditempuh melalui berbagai cara seperti: Proteksi, pengenaan tarif tinggi atas barang impor, dumping, perlindungan buruh, dan lain-lain. Di sinilah negara (sebagai institusi politik) memiliki peranan penting. Singkatnya, perekonomian tunduk pada komunitas politik, khususnya pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab penuh untuk memajukan kepentingan nasional dengan cara apapun.

Teori “*Dual Economy*”

Teori *dual economy* atau dualisme ekonomi menyatakan bahwa setiap gejala perekonomian domestik maupun internasional harus dianalisis dari dua sektor yang satu sama lain secara relatif independen. Pertama adalah sektor moderen yang progresif yang dicirikan oleh suatu integrasi dan efisiensi tingkat tinggi. Kedua adalah sektor tradisional yang diwarnai oleh sebuah keterbelakangan cara-cara produksi dan swasembada lokal. Tokoh-tokoh teori ini adalah mereka yang pada umumnya mengembangkan pemikiran-pemikiran liberalisme ekonomi. Di Indonesia kita mengenal J.H. Boeke yang menganalisis tentang kedudukan ekonomi kolonial dan pribumi pada masa lalu yang memberikan adanya penilaian tentang konsep dualisme ekonomi itu. Teori disokong kuat oleh para penganut teori modernisasi pembangunan seperti W.W. Rostow.

Teori *dual economy* menilai bahwa proses perkembangan ekonomi adalah proses transformasi dari sektor tradisional menuju sektor moderen melalui modernisasi struktur-struktur ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses transformasi ini terjadi kerusakan nilai-nilai lama dan muncullah nilai-nilai baru, seperti individualisme dalam masyarakat, rasionalitas ekonomi, dan maksimalisasi tingkah laku. Selain itu, integrasi ekonomi global yang berwujud sistem pasar dan institusi-institusi lainnya, merupakan konsekuensi dari pergerakan kekuatan-kekuatan pasar ke arah efisiensi ekonomi dan saling ketergantungan global. Menurut teoritis *dual economy*, munculnya suatu ekonomi pasar adalah sebagai akibat alamiah dari bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Kemajuan-kemajuan dalam bidang komunikasi dan transportasi, perkembangan efisiensi lembaga-lembaga ekonomi, dan pengurangan biaya-biaya transaksi, merupakan faktor pendorong bagi transformasi dari perekonomian tradisional ke moderen.

Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa lambat laun sistem pasar akan membawa daerah-daerah baru ke dalam orbit perekonomian internasional. Proses semacam ini setidaknya pertama kali terbukti ketika negara-negara kapitalis Eropa melakukan ekspansi ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai abad ke-16. Sektor moderen yang diperkenalkan negara-negara kapitalis Eropa mulai merambah ke sektor keterbelakangan di ketiga bagian dunia tersebut. Dalam pandangan teori ini, kekuatan-kekuatan pokok yang bekerja di balik proses transformasi dari sektor tradisional ke sektor moderen adalah: efisiensi ekonomi, aktifitas yang terorganisasi, dan perkembangan teknologi. Hal tersebut mencakup pengenalan teknik-teknik yang produktif, pembukaan pasar-pasar baru dan sumber-sumber penawaran, serta munculnya

sarana-sarana baru dalam pengaturan dan pengelolaan aktifitas ekonomi. Moneterisasi kehidupan ekonomi, munculnya kota-kota, dan perkembangan dalam komunikasi dan transportasi merupakan faktor-faktor penting. Melalui perkembangan ini semua telah mengurangi biaya-biaya transaksi ekonomi dan oleh karena itu telah memperlicin ekspansi pasar serta mengintegrasikan sektor-sektor tradisional ke dalam interdependensi perekonomian internasional.

Menurut para penganut *dual economy* proses evolusi ekonomi (dalam lingkup domestic maupun internasional) dikendalikan oleh kompetisi pasar, mekanisme harga, efisiensi produksi, dan maksimalisasi kekayaan. Aktor-aktor ekonomi yang tidak efisien akan dipaksa menyesuaikan perilaku mereka sesuai tuntutan pasar atau memilih resiko menghadapi kehancuran aktifitas ekonominya. Sebagai akibat dari ekspansi pasar, akumulasi modal dan faktor-faktor produksi lainnya, juga penemuan teknologi dan bentuk-bentuk organisasi baru, telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan interdependensi global di antara masyarakat internasional.

Melalui beberapa kasus yang kita lihat, teori *dual economy* memberikan bukti yang meyakinkan tentang adanya transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju ke arah kemajuan sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara industri baru di Asia yang mengalami kemajuan pesat, seperti: Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Negara-negara tersebut telah berhasil melakukan transformasi melalui cara-cara liberal di bidang ekonomi, sehingga memungkinkan tampil sebagai negara maju. Langkah tersebut juga disusul dengan negara-negara lain, seperti: Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam belakangan ini. Kemampuan mereka dalam mengadopsi nilai-nilai liberal dan meninggalkan secara perlahan bentuk-bentuk ekonomi tradisional mulai menunjukkan hasilnya.

Teori Sistem Dunia Modern (MWS)

Teori selanjutnya adalah teori Sistem Dunia atau seringkali disebut sebagai Sistem Dunia Modern (*Modern World System*). Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Sumber pijakan dari teori MWS adalah ajaran-ajaran Neo-Marxis serta mazhab “Annales” dalam bidang sejarah yang dikembangkan Fernand Braudel di Perancis. Melalui cara ini Wallerstein melihat tatanan ekonomi dunia sebagai suatu kesatuan unit analisa yang secara total berkait satu sama sama lain secara sistemik. Proses-proses perubahan yang terjadi dianalisis dalam kerangka

jangka panjang yang dianggap cukup untuk mewartakan “perhitungan logis”. Dengan menggunakan referensi waktu jangka panjang (*la lon que duree*) maka ketotalan dan lapisan paling dalam dari kehidupan sosial itu dilihat sebagai perubahan perlahan dan bersifat pengulangan (Wallerstein 1974).

Sementara dari aliran Neo-Marxis, Wallerstein menggunakan konsep-konsep yang dikemukakan para teoritis dependensia, seperti: Paul Baran, Andre Gunder Frank, Dos Santos, Samir Amin, dan lain-lain. Secara provokatif Wallerstein sendiri menyatakan perspektif Sistem Dunia Modern bukanlah merupakan teori, melainkan suatu protes melawan kecenderungan terbentuknya pemahaman ilmu sosial yang keliru sejak dari lahirnya pada pertengahan abad 19 (Wallerstein 1987: 309).

Tesis utama dari teori MWS menyatakan bahwa dunia moderen hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu *division of labor* tunggal dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Hierarki tersebut terdiri dari “pusat” (*center*) yang maju dan dominan; serta “pinggiran” (*periphery*) yang tergantung dan terbelakang. Secara ekonomi maupun politik, daerah “pusat” yang metropolis menciptakan keterbelakangan di daerah-daerah “pinggiran”. Hubungan antara “pusat” dan “pinggiran” bercorak eksploitatif, yang ditandai adanya aliran surplus ke negara-negara “pusat”. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ketimpangan di negara-negara pinggiran. Negara-negara pinggiran terjebak dalam siklus atau pusaran keterbelakangan.

Menurut teori MWS, ekonomi internasional merupakan arena pertarungan kepentingan antara negara-negara pusat yang maju dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang, dalam wujud penghisapan, yang menyebabkan negara-negara terbelakang terhalang kemajuannya baik secara ekonomi maupun politik. Pembagian kerja internasional secara langgeng telah menempatkan negara-negara pinggiran selalu pada posisi tergantung kepada negara-negara maju. Melalui kemampuan ekonomi, jenis produksi, teknologi dan strategi perdagangan yang diciptakan sedemikian rupa, negara-negara pusat (maju) menikmati aliran surplus perdagangan yang secara bersamaan memiskinkan negara-negara pinggiran. Dengan demikian, fenomena pembangunan dan keterbelakangan dalam perspektif hubungan internasional tidak lain merupakan sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Bagaimana keadaan ini bisa terjadi?

Menurut Wallerstein, akar terbentuknya struktur hubungan ekonomi seperti itu bisa dilacak jauh ke belakang, semenjak lahirnya sistem ekonomi-kapitalis dunia sekitar tahun 1500 an, yang kemudian secara perlahan bertransformasi melalui tahapan-tahapan krusial. Beliau menyatakan bahwa, sistem ekonomi kapitalis dunia berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (*the cyclical rhythms*), yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Perputaran inilah yang secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi sentral, semi pinggiran, bahkan terlempar menjadi pinggiran (Wallerstein 1984: 13-26). ..

Para teoritis MWS memandang negara (*state*) dan pasar (*market*) sebagai “fenomena kedua” kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang lebih dalam yang mendorong ekonomi dunia ke dalam suatu cara untuk mengintegrasikan daerah pusat dan pinggiran. Dalam konteks ini, mereka tidak lagi melihat kelas dan status sebagai bentuk pengelompokan dalam suatu negara, tetapi memandangnya sebagai bentuk pelapisan dalam sistem ekonomi dunia. Jadi, sistem ekonomi dunia bukanlah merupakan tatanan yang terisolasi secara nasional tetapi terintegrasi secara global berdasarkan tatanan yang tersusun secara struktural serta mengalami transformasi kesejarahan yang panjang dan kompleks.

Menurut Wallerstein tatanan ini harus dilawan bersama oleh negara-negara berkembang melalui suatu gerakan antisistem berskala global dengan mengarahkan semua energi pada sumber-sumber surplus ekonomi. Sasarannya adalah agar penyedotan surplus ekonomi global secara besar-besaran dapat dihentikan dengan jalan mengurangi tingkat laba serta lebih memperhatikan pada persoalan pemerataan. Jadi berbeda dengan teori Dual Economy yang menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara berkembang bersifat saling menguntungkan, teori MWS justru berpandangan sebaliknya, hubungan itu bersifat merugikan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa, pertama teori ini menerima supremasi arena politik dan perjuangan kelas atas konflik-konflik politik, namun juga menerima arena ekonomi sebagai determinan perilaku manusia. Kedua, teori MWS berasumsi bahwa sistem dunia tersusun dari suatu hierarki negara-negara yang terdominasi (tergantung)

dan negara-negara yang mendominasi atau menguasai. Ketiga, ekonomi dunia moderen ditandai oleh krisis-krisis yang tak dapat dihindari sebagai akibat dari benturan kepentingan antarnegara.

Namun demikian, teori ini memiliki kelemahan, yakni cenderung mengeksternalisasikan kesalahan pembangunan yang berlaku di negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Seolah-olah seluruh dampak negatif pembangunan di negara-negara pinggiran disebabkan oleh kebijakan jahat yang sengaja dirancang oleh negara-negara maju. Padahal banyak sekali keterbelakangan yang wujud di negara-negara pinggiran (berkembang) disebabkan oleh faktor-faktor internal mereka sendiri, seperti: Struktur sosial, sistem politik, tingkat korupsi, orientasi budaya, tingkat pendidikan, lemahnya institusi, motivasi kemajuan, dan lain. Faktor-faktor itu justru kurang diperhitungkan oleh para teoritis MWS.

Teori Stabilitas Hegemonis

Teori yang selanjutnya adalah Teori Stabilitas Hegemonis. Salah satu tokoh utama pendukung teori ini adalah Charles P. Kindleberger. Melalui berbagai tulisannya Kindleberger menyatakan bahwa teori ini memiliki keunggulan di dalam menjelaskan fenomena ekonomi politik internasional. Sementara istilah “hegemoni” berasal dari salah seorang intelektual Neo-Marxis Italia, yakni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekerasan, melainkan satu hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi yang dibina berdasarkan mekanisme konsensus. Hegemoni merupakan suatu usaha sistematis dari kelas yang berkuasa untuk menanamkan fahaman dominannya agar tetap berkuasa dengan cara menanamkan keyakinan-keyakinan tertentu ke dalam pikiran dan cara hidup masyarakat (Brown 2001: 188). Dengan kata lain, hegemoni berlaku jika ideologi, nilai-nilai, keyakinan, cara hidup, dan sistem, daripada golongan yang mendominasi telah diambil alih dan diterima secara sukarela oleh yang didominasi.

Tesis utama Teori Stabilitas Hegemonis menyatakan bahwa, suatu sistem ekonomi dunia yang stabil membutuhkan satu kepemimpinan tunggal yang bersedia menjalankan peranan sebagai penjaga stabilitas. Kekuatan itu mestilah suatu kuasa ekonomi, politik, sosial dan militer yang berkuasa secara dominan dan mampu menjadi “jangkar” bagi berlangsungnya sistem yang ada (Keohane 1988: 57-58). Negara atau kekuasaan yang menjadi pemimpin ini hendaklah mampu menegakkan aturan-aturan sedemikian rupa sekaligus pelindung bagi kepentingan

negara-negara yang lebih kecil. Dia mampu menyediakan jalan keluar bagi produk-produk negara lain yang sulit dipasarkan, menyediakan modal (sebagai donor) bagi negara-negara lain yang membutuhkan, berperan sebagai pemberi pinjaman bila terjadi krisis finansial yang mengancam stabilitas kawasan maupun global, menjaga struktur nilai tukar, dan mengkoordinasikan kebijakan makroekonomi agar tetap seimbang, memiliki kapasitas mengontrol perilaku investasi, dan lain-lain.

Dalam pandangan teori ini struktur kekuatan hegemonis yang didominasi oleh suatu kuasa tunggal akan memberikan kepastian atau suasana kondusif bagi pengembangan rezim internasional yang kuat dan stabil. Ekonomi dunia tidak akan mudah menghadapi guncangan serta tekanan berat sekiranya sang kuasa hegemonis itu mampu bertindak atas nama masyarakat ekonomi internasional. Karena dalam pandangan teoritis hegemonis, suatu sistem ekonomi yang liberal dan terbuka tidak bisa dibiarkan dengan sendirinya tanpa adanya kendali dari suatu kekuatan hegemonis tertentu. Tanpa adanya kekuatan hegemonis, dikhawatirkan terjadi benturan kepentingan ekonomi yang keras di antara bangsa-bangsa, bahkan juga anarkhi, di mana negara yang kuat akan memangsa negara-negara yang lemah. Dalam kaitan ini Kindleberger lebih sering menyebut istilah “kepemimpinan” ketimbang hegemoni.

Para teoritis stabilitas hegemonis berpendapat bahwa semua negara berkepentingan untuk menjaga agar struktur kekuatan hegemonis tidak runtuh, karena hal tersebut akan menimbulkan penurunan rezim internasional yang kuat dan stabil. Karena jika struktur kekuatan hegemonis runtuh maka norma-norma, aturan-aturan, dan kerangka ekonomi liberal akan berantakan juga (Keohane 1988: 64). Sistem perdagangan liberal membutuhkan hadirnya kekuatan hegemonis. Meskipun demikian, teori ini tidak menyatakan bahwa perekonomian internasional tidak berjalan atau tidak berfungsi sekiranya kekuatan hegemonis itu absen. Mereka hanya menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi liberal yang non diskriminasi, terbuka, dan fair, dengan segala tertib serta aturan mainnya sukar ditegakkan jika tanpa ada kekuatan hegemonis tertentu yang dapat menjadi “jangkar” penjaga.

Bagaimanapun hegemoni tanpa adanya komitmen terhadap pasar (liberal) akan mengarah menjadi sistem imperial dan menimbulkan hambatan-hambatan ekonomi dan politik atas negara-negara lemah. Negara-negara yang kuat akan dengan mudah dan semaunya memaksakan kepentingannya tanpa mengiraukan adanya tertib internasional. Karena itu, persamaan tujuan sosial dalam mendukung suatu sistem liberal harus ada di antara kekuatan-kekuatan ekonomi

utama, khususnya negara-negara besar (*big power*) ataupun negara-negara *middle power* dengan pengaruh ekonomi, politik, maupun militer yang kuat. Negara-negara tersebut harus dipastikan akan memperoleh keuntungan dalam pertumbuhan hubungan pasar, sekiranya sistem hegemonis tegak. Dalam konteks ini, negara hegemonis dapat mendorong, tetapi tidak dapat memaksa, negara-negara yang memiliki kekuatan lainnya mengikuti aturan-aturan dari suatu perekonomian dunia yang terbuka. Kita bisa memahami contoh ini dengan melihat bagaimana langkah-langkah Amerika Serikat dan negara-negara G-8 dalam mendorong tertib internasional liberal dua dekade belakangan.

Usaha-usaha penegakan kepemimpinan hegemonis dilakukan berdasarkan persetujuan serta kepercayaan umum. Tahapan tersebut dicapai melalui suatu tingkat konsensus ideologi (atau menurut Antonio Gramsci disebut “hegemoni ideologi”) yang didukung negara-negara besar lainnya. Prasyarat dukungan ini sangat diperlukan sebagai kekuatan penyangga sang negara pemimpin. Namun, jika negara-negara besar lainnya itu mulai memandang tindakan dari negara hegemonis sebagai berlawanan dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri, maka sistem hegemonis akan menjadi goyah. Sistem itu juga akan guncang jika rakyat dari kekuatan hegemonis melihat bahwa negara-negara besar lain sedang menipu, ataupun mereka merasa bahwa keuntungan yang diraih sebagai negara pemimpin tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan.

Jaminan adanya keuntungan secara proporsional, baik terhadap sang negara pemimpin maupun kekuatan-kekuatan besar yang menjadi pilar penyokong mutlak diperlukan. Hal yang sama juga berlaku bagi kekuatan-kekuatan (negara-negara) lain yang menjadi pendukung sistem tersebut yang dengan sukarela mensubordinasikan kepentingan mereka terhadap kelanjutan sistem. Dalam hal ini kemampuan negara hegemonis sangat diperlukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gilpin & Gilpin (2002: XVI):

Negara-negara individual dan kelompok-kelompok berkuasa di dalam negara-negara yang percaya bahwa ekonomi dunia berfungsi tidak adil dan merugikan mereka, atau yang ingin mengubah sistem demi keuntungan mereka sendiri dan merugikan yang lain, adalah ancaman yang selalu ada terhadap sistem ini. Sistem kapitalisme internasional tidak mungkin dapat bertahan tanpa adanya kepemimpinan yang kuat dan bijak. Kepemimpinan internasional harus mendorong kerjasama internasional untuk membangun dan memperkuat aturan-aturan yang mengatur perdagangan, investasi asing, dan hubungan-hubungan moneter...kepemimpinan perlu meyakinkan akan setidaknya terdapat pengamanan minimum terhadap mereka yang kalah oleh kekuatan-kekuatan

pasar dan proses penghancuran kreatif; mereka yang kalah setidaknya harus percaya bahwa sistem berfungsi secara adil.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi politik internasional terlihat bagaimana selama abad ke 19 sistem ekonomi liberal berkembang dengan stabil dengan kepemimpinan hegemonis Inggris. Dengan kemampuan yang dimilikinya, baik ekonomi, politik, maupun militer, Inggris sanggup menyangga norma-norma ekonomi liberal dan mampu menjadi stabilizer perekonomian internasional. Sepanjang abad tersebut tidak ada satupun kekuatan utama dunia yang mampu menyaingi pengaruh Inggris. Namun demikian, memasuki abad ke abad 20 pergeseran-pergeseran baru terjadi dan secara alamiah hegemoni Inggris mengalami kemerosotan.

Puncaknya adalah ketika terjadi *malaise* ekonomi (krisis ekonomi) besar pada tahun 1930 yang menyebabkan kepemimpinan hegemonis Inggris runtuh. Negara tersebut dianggap gagal menjaga stabilitas, tertib, dan norma-norma ekonomi liberal. Pengaruhnya dalam kepemimpinan ekonomi dan politik dunia diambil alih oleh Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia II pengaruh Amerika Serikat semakin kuat sebagai negara adidaya, dan secara bersamaan muncullah Sistem Bretton Woods yang menjadi dasar dari sistem ekonomi liberal dewasa ini. Sebagai negara besar dengan segala kemajuan di segala bidang Amerika Serikat kemudian menjadi kekuatan hegemonis baru yang sampai sejauh ini sukar ditandingi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kita mengetahui bahwa terdapat beberapa aliran utama dalam sub-disiplin ekonomi politik internasional, yakni: Teori Perdagangan Liberal; Teori Perdagangan Nasionalis; Teori “Dual Economy”; Teori Sistem Dunia Modern (MWS); Teori Stabilitas Hegemonis. Masing-masing teori tersebut telah menunjukkan aspek penting hubungan ekonomi dan politik. Di samping memiliki keunggulan masing-masing, teori-teori di atas juga membuka kelemahan-kelemahan teori lain, sehingga memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana kekuatannya dalam menjelaskan kecenderungan-kecenderungan ekonomi global dewasa ini. Namun yang pasti masing-masing teori tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kita memerlukan elemen-elemen dari pandangan masing-masing agar dapat mengetahui hubungan kompleks antara ekonomi dan politik.

Dengan semakin meningkatnya derajat ketergantungan antar negara sekarang ini, hampir dipastikan bahwa tidak ada satupun postulat yang mujarab yang bisa dipakai untuk menjawab

persoalan-persoalan yang muncul. Dalam perkembangan studi hubungan internasional yang mutakhir justru beberapa teori tersebut sering dipaparkan secara sinergis melalui analisis para ahli. Argumen-argumen yang dikemukakan masing-masing pendukung teori di atas amat memperkaya khazanah pengetahuan kita dalam memahami kecenderungan-kecenderungan global ekonomi politik yang belakangan ini seringkali sukar untuk diprediksi. Seperti adanya krisis yang cenderung berulang-ulang di sejumlah bagian dunia dewasa ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, Christ, *Understanding International Relations*, Second Edition, New York: PALGRAVE, 2001.
- Frieden, Jeffry A. and Lake, David A., *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, New York: St. Martin Press, 1991.
- Gilpin, Robert, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press, 1987.
- Gilpin, Robert & Gilpin, Millis Jean, *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, Terj. Haris Munandar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional*, Terj. Budiono Kusumohamidjojo, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Keohane, Robert O., "The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes" in Ole Holsti, (eds.), *Change in the International System*, New York: West View, 1988.
- Wallerstein, Immanuel, *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press, 1974.
- Wallerstein, Immanuel, *The Politics of the Capitalist World-Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Wallerstein, Immanuel, "World Sytem Analysis", dalam Anthony Giddens and Jonathan Turner (eds.), *Social Theory Today*, Stanford: Stanford University Pers, 1987.

